KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA

Oleh: Raja Thesa Gusniardy

Pembimbing 1 : Dr.Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R. S.H.,M.H

Alamat: Jalan Sejahtera No.5, Sail, Pekanbaru.

Email: rajathesa88@gmail.com

ABSTRACT

People smuggling is transnational organized and has had a negative impact on various countries as Indonesia's transit. People smuggling is an additional problem in addition to the immigration problem, and is still increasing the funds needed to tackle the problem of people smuggling in Indonesia, or what is known as a crime policy.

The purpose of this thesis discussion, namely: First, to find answers to current legal policies in the handling of criminal acts of people smuggling in Indonesia. Second, to find the concept of struggle that can be proposed in the renewal of legal policies against the prevention of people smuggling in Indonesia. This type of research used in this study is normative legal research. Data sources used are secondary data sources obtained from the literature, including published official documents, books, legal journals and so on.

From the results of the study, it can be concluded the main thing. First, the legal policy in tackling the crime of people smuggling in Indonesia is still a lot of weaknesses. Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration has not been able to cover all aspects of handling human smuggling. Secondly, the concept that can be agreed upon in legal reforms in dealing with acts of people smuggling in Indonesia is by establishing laws and regulations governing people smuggling in order to secure legal certainty (the principle of legality) in Indonesia.

Keywords: Criminal Law Policy - Prevention - People Smuggling

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap berbagai penyelundupan, termasuk penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan demikian, tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan manusia melalui darat, laut, dan udara membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerjasama, pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.¹

Penyebab dan latar belakang terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas dari kondisi, tatanan, bahkan sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Berbagai tekanan dalam masalah kependudukan, masalah ketimpangan strategi atau tidak meratanya pembagian kesempatan dan pembangunan sosial-ekonomi, ataupun terjadinya berbagai konflik dengan alasan yang beranekaragam, telah lama dipahami sebagai pemicu

terjadinya arus migrasi yang tidak sah.²

Imigran gelap dan penyelundupan manusia ke Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru lebih menjadi pilihan dalam proses migrasi. Laporan dari *Bureau of Public Affairs, US Department of State* pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800.000 – 900.000 orang telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung.³

Tindak pidana penyelundupan manusia masih diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang tertuang hanya dalam satu pasal yakni Pasal 120. Tindak pidana penyelundupan manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak diatur tersendiri dalam suatu bab melainkan masuk dalam Bab XI yang mengatur mengenai ketentuan pidana keimigrasian. Ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 masih banyak mengandung kelemahan, perlu nya perbaikan aturan dan Undang-Undang yang khusus mengatur

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

² Natalis Pigay, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta:2006, hlm. 120.

³ M. Imam Santoso, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta:2013, hlm.163.

tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penelitian dengan judul : **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di Indonesia?
2. Apakah upaya yang dapat diusulkan dalam pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menemukan jawaban kebijakan hukum pidana saat ini dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di Indonesia.
 - b. Untuk menemukan konsep upaya yang dapat diusulkan dalam pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi Penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta wawasan,

baik secara teoritis maupun secara praktik mengenai apa saja yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia.

- b. sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya sepanjang yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.
- c. dapat berguna bagi praktisi hukum memberikan masukan dan memecahkan masalah pada penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.⁴ Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri.

⁴ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 20.

makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, antara lain:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional;
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat;
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Menurut Muladi bahwa pembaharuan hukum pidana didasarkan kepada tuntutan adaptif yakni agar hukum pidana mampu beradaptasi dengan perkembangan dalam pergaulan masyarakat yang bergerak cepat.⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana adalah cabang dari ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan. Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 60.

terhadap kejahatan melalui penegakan hukum.⁶

2. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memiliki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen yang sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yang juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal

⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta:2016, hlm.124

⁷ Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2015, hlm.14.

biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang dipandang dari sudut penerapannya yang menggunakan penelitian murni (atau disebut juga penelitian dasar atau fundamental), penelitian murni biasanya ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri atau teori maupun pengembangan metodologi penelitian.¹⁰

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The

⁹ Soejonno, Abdurrahman, Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta:1999, hlm.56.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:2012, hlm.10.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang diteliti pada bahan-bahan primer yaitu:

- 1) Buku mengenai undang-undang dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data yang tertulis yang terkait dengan penelitian.
- 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus besar bahasa

indonesia, kamus hukum dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif digunakan metode kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna menganalisa, baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan tertulis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Indonesia

Tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU

Keimigrasian). Dalam Undang-Undang tersebut, penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) dan (2).

Ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 masih banyak mengandung kelemahan, perlu nya perbaikan aturan dan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, hal percobaan penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 ayat (2) tidak diatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia dilakukan oleh kejahatan terorganisasi. Yang diatur adalah jika tindak pidana penyelundupan manusia dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya.

(2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindakan yang membahayakan kehidupan atau keselamatan para migran atau adanya perlakuan tidak manusiawi termasuk eksploitasi terhadap para migran, ketentuan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Hal ini menjadi penting karena tindak pidana penyelundupan manusia

¹¹ Aslim Arsyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru:2005, hlm.20.

sudah semakin merajalela dengan berbagai modusnya, namun di Indonesia masih dianggap sebagai persoalan administrasi semata dan hanya diatur beberapa pasal dalam UU Keimigrasian.

Imigran gelap yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai korban penyelundupan manusia, padahal Undang-Undang tentang *people smuggling* tidak ada di Indonesia, mengakibatkan para imigran gelap merasa sangat aman di Indonesia, merasa bebas tanpa dikenakan hukum Indonesia. Yang terjerat hukum Indonesia hanyalah WNI yang juga ikut terlibat dalam penyelundupan manusia.¹² Contohnya adalah kasus Abdul Hamid, warga negara Indonesia asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dikenakan hukuman penjara selama enam tahun oleh Pengadilan Perth, Australia Barat karena terbukti bersalah menyelundupkan tiga warga Iran dan sembilan warga Afghanistan ke negara itu pada 29 September 2008.¹³

B. Upaya yang dapat Diusulkan dalam Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Indonesia

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikir terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis. Termasuk masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan

pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana, pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.¹⁴

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai serta sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁵

Ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian tidak menunjukkan adanya muatan sanksi tindakan terhadap pelaku penyelundupan manusia di Indonesia. Selain itu Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian ayat (2) menetapkan

¹² Sam Fernando, Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) dalam menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm.7

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Total Media, Yogyakarta: 2013, hlm.195.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, ..., Op.Cit.*, hlm.29.

pidana yang sama terhadap percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Selanjutnya, ketentuan terhadap orang yang diselundupkan terdapat pada Pasal 86 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan: "Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia". Pasal tersebut menyebut orang yang diselundupkan sebagai "korban". Padahal orang yang diselundupkan menyadari keseluruhan proses dan bahkan ikut berperan aktif, sehingga dapat pula disebut sebagai pelaku.

Koordinasi antar instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Keimigrasian, TNI AL dan Pemda setempat perlu ditingkatkan dalam melakukan penanganan penyelundupan manusia di daerah perbatasan. Hal ini ditemukannya kendala berupa kurangnya koordinasi karena terdapat berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan penyelundupan manusia. Misalnya tentang kewenangan penuh yang dimiliki oleh pihak Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana, ternyata dimiliki juga oleh Dirjen Keimigrasian dengan dasar yang diatur dalam Pasal 120 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, sering muncul salah pemaknaan atas interpretasi pasal tersebut oleh pihak kepolisian yang menganggap penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia ada di tangan Dirjen Keimigrasian.

Tidak jarang hal tersebut mengganggu kinerja dari system hukum itu sendiri dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan ini.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum mengatur dan menjadikan masyarakat agar menjadi taat dan teratur termasuk pelaku penyelundupan manusia. Kasus-kasus penyelundupan tersebut harusnya menjadi cerminan bangsa Indonesia untuk lebih tanggap dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia. Maka upaya yang dapat diusulkan dalam pembaharuan kebijakan hukum pidana dengan tujuan penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia harus dibarengi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) agar terjaminnya kepastian hukum (*asas legalitas*) di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia masih terdapat banyak kelemahan. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum dapat mencakup keseluruhan aspek dalam penanggulangan penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia

merupakan tindak pidana yang bersifat khusus dan sudah selayaknya diatur dalam aturan yang khusus.

2. Upaya yang dapat diusulkan dalam pembaharuan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia yaitu Peningkatan kesadaran tentang kejahatan manusia, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Mengoptimalkan peran dan koordinasi aparat/otoritas terkait untuk pengawasan keamanan perbatasan, dan Koordinasi antar instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Keimigrasian, TNI AL dan Pemda setempat. Maka kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia harus dibarengi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) agar terjaminnya kepastian hukum (asas legalitas) di Indonesia.

B.Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap pemegang kebijakan legislasi sudah seharusnya tindak pidana penyelundupan manusia mempunyai undang-undang khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia, mengingat tindak pidana penyelundupan manusia merupakan tindak pidana khusus

yang sudah selayaknya diatur dalam aturan yang khusus.

Pembaharuan hukum pidana perlu upaya serius dari pemerintah untuk menanggulangi serta mencegah dampak berkepanjangan akibat penyelundupan manusia, khususnya tentang keberadaan warga negara asing di Indonesia, hal tersebut demi terwujudnya perlindungan masyarakat serta kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

_____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2009, *Tujuan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

_____, 2010, *Kebijakan legislatif dalam*

- Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arsyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Bakhri, Syaiful, 2013, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana di Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Reflika Aditama, Bandung.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1992, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP*, PT. Pradyana Paramita.
- _____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000, *Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1976, *Apakah The Rule of Law itu?*, Alumni, Bandung.
- Hartono, 2010, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- IOM, 2012, *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia "Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia"*, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Nuraeny, Henny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pigay, Natalis, 2006, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Prayitno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utama, Bandung.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Rosadi, Otoong dan Andi Desmon, 2012, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sadli, Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Imam, 2007, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta.
- Soedarto, 1986, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia*, Bina Cipta, Bandung

- _____, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soejonno, Abdurrahman, 1999, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *hukum pidana horizon baru pasca reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Trisna, Wessy, 2011, *Praperadilan Dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases)*, Pustaka Bangsa, Medan.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Kenn Lazuardi Syarnubi, "Penyelundupan Manusia yang Dilakukan oleh Sindikat Internasional di Jakarta", *Jurnal Ilmu Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2014.

C. Website

<http://www.zonalinenews.com/2017/06/penyelundupan-orang-dan-perdagangan-orang>, diakses, tanggal, 28 April 2019.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4ef49e0b7c90c/penyelundup-imigran-gelap-dijerat-dua-undangundang>. Diakses Rabu 3 Juli 2019.

<https://riau.antaranews.com/berita/94015/tiga-terdakwa-penyelundupan-manusia-di-dumai-terima-vonis-bebas>. Diakses Rabu 3 Juli 2019.

D. Jurnal/Kamus/Skripsi/Tesis

Evelyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana*, Universitas Syiah Kuala, Vol.2, No.2 Agustus 2014.

Ahmad Risyad Fadli, "Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, 2018.

Firdaus, "Membangun Hukum Indonesia yang berwawasan nilai-nilai Pancasila", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. IV, No. 1 Juni 2011.

Debby Kristin, Chloryne Trie Isana Dewi, *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia : Tanggung Jawab Indonesia dan Australia*, Volume 1 No. 1, Bandung, Padjajaran Journal of International Law, 2017.

Hospita Yulima S., *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Indonesia, 2012.

Eranovita Kalalo Paembonan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan

- Orang (People Smuggling)”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No.4 , Ags-Nov,2014.
- Noldy Mohede, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Vol XIX/No.4/Juli-September/2011.
- Aleardo Zanghelini, “A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence Can J.L and Juris.* 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 13 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Sam Fernando, Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) dalam menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,2013.
- Boy Mono Indra, “Pengaturan Mekanisme Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri Dikaitkan Dengan Putusan Praperadilan Yang Diterima Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru:2017.
- St.Paul Mercury Indem, “Supreme Court of the United States” , U.S. Government Works, 2016, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 15 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.